



**DEWAN MANGARAJA
LOKUS (LEMBAGA) ADAT BUDAYA BATAK**

**NASKAH *GURATGURAT BOLON NI PARAO* LOKUS ADAT
BUDAYA BATAK**

BAB I

PENDAHULUAN

A. JANGKA WAKTU

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, LOKUS ADAT BUDAYA BATAK dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita pendiriannya, berlandaskan pada kesadaran dan keteguhan hati, pada jiwa dan nilai-nilai *Dalihan Na Tolu* dalam kebangsaan, ketua umum pungan marga, pungan parsadaan marga-marga, dan aktivis sosial budaya Batak telah memulai babak baru merumuskan arah atau Kebijakan Nasional (*Guratgurat Bolon Ni Parao*) LABB Jangka Panjang Dua Puluh Delapan Tahun Pertama dan *Guratgurat Bolon Ni Parao* LABB Jangka Menengah Empat Tahun pertama selaras dengan peran fungsi dan posisinya, yaitu sebagai satu-satunya Organisasi Sosial Budaya Batak yang berkarakter *klein republiken* yang mandiri dan independen untuk bersama-sama mewujudkan tujuan pendirian LABB dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guratgurat Bolon Ni Parao LABB Jangka Menengah Empat Tahun Pertama, merupakan awal dan bagian dari *Guratgurat Bolon*

Ni Parao LABB Jangka Panjang Dua Puluh Delapan Tahun Pertama. Seluruh Program Kerja Nasional dan kegiatan-kegiatan LOKUS ADAT BUDAYA BATAK bermuara dari *Guratgurat Bolon Ni Parao* LABB.

Dalam *Guratgurat Bolon Ni Parao* bangsa Batak Jangka Panjang Dua Puluh Delapan Tahun Pertama Tujuan dan cita-cita pendirian Lembaga Adat Budaya Batak diharapkan sebagian besar telah terwujud sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Konstitusi 2019 LABB. Dalam *Guratgurat Bolon Ni Parao* LABB Jangka Menengah Empat Tahun Pertama diharapkan telah berhasil meletakkan dasar-dasar Ketataorganisasian LABB yang kokoh, akuntabel, dan transparan guna melanjutkan *Guratgurat Bolon Ni Parao* LABB Jangka Menengah Empat Tahun berikutnya.

B. PENGERTIAN

Guratgurat Bolon Ni Parao Lokus Adat Budaya Batak adalah arah atau kebijakan lembaga tentang bagaimana mewujudkan tujuan dan cita-cita pendiriannya melalui kemitraan dengan penyelenggara Pemerintahan, penyelenggara Negara, dan institusi-institusi non-pemerintah sebagai pernyataan kehendak warga bangsa Batak yang ditetapkan pertama kali oleh pendiri Lokus Adat Budaya Batak dan selanjutnya akan ditetapkan melalui mekanisme *Parluhutan* Nasional LABB setiap empat tahun.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Guratgurat Bolon Ni Parao LABB ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan panduan bagi perjuangan Lokus Adat

Budaya Batak melaksanakan program-program kerjanya dengan tujuan mewujudkan kondisi yang dibutuhkan oleh warga *bangso* Batak baik dalam jangka sedang/menengah 4 tahun maupun dalam jangka panjang 28 tahun, sehingga secara bertahap cita-cita dan tujuan pendirian LABB seperti termaktub dalam Konstitusi 2019 Lokus Adat Budaya Batak dapat tercapai.

D. LANDASAN

Guratgurat Bolon Ni Parao LABB disusun berlandaskan (Idiil, Konstitusi, dan Operasional) pada nilai-nilai *Dalihan Na Tolu* dan Kebangsaan Indonesia.

E. RUANG LINGKUP

Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang dibutuhkan dan diperjuangkan LABB serta bagaimana mencapainya, baik dalam jangka menengah, maupun dalam jangka panjang, *Guratgurat Bolon Ni Parao* LABB yang materinya terdiri atas Program Kerja Nasional Jangka Panjang dan Program kerja Nasional Jangka Menengah disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: VISI MISI DAN SESANTI
BAB III	: ARAH PROGRAM KERJA NASIONAL
BAB IV	: PROGRAM KERJA EMPAT TAHUN PERTAMA
BAB V	: PELAKSANAAN
BAB VI	: PENUTUP

BAB II

VISI MISI DAN SESANTI

A. VISI

Mewujudkan *bangso* Batak yang Bersatu, Beriman, Cerdas, Sejahtera, Beradat, Beradab, dan Beridentitas (BERNAS CERDAS) dalam rangka memperkuat kebangsaan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. MISI

Untuk mewujudkan VISI *bangso* Batak, ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Melindungi segenap *bangso* Batak dan tanah ulayatnya;
2. Mencerdaskan kehidupan *bangso* Batak;
3. Mengupayakan Kesejahteraan *bangso* Batak;
4. Mengembangkan, Memanfaatkan, Membina Kebudayaan, Cagar Budaya, *bangso* Batak;
5. Menghadirkan Ruhut-ruhut atau pedoman praktik adat-istiadat yang efektif dan efisien serta *Patik Uhum Habatahon Bangso* Batak.
6. Mengembangkan dan Melestarikan Seni Budaya *bangso* Batak;
7. Melaksanakan ketertiban umum berdasarkan Etika adat Dalihan Na Tolu, Etika agama sesuai dengan ajaran

masing-masing agama, dan Etika kasih bangsa Pancasila,

C. SESANTI

Sesanti perjuangan Lokus Adat Budaya Batak Adalah :
Dalihan Na Tolu

- *Manat mardongan tubu* (Mawas diri terhadap sesama satu marga/satu keturunan).
- *Somba marhula-hula* (Hormat dan santun kepada paman, ipar).
- *Elek marboru* (Pandai mengambil hati saudara perempuan atau putri kita).

BAB III
A. MAKNA DAN HAKIKAT
ARAH GURATGURAT BOLON NI PARAO LABB
JANGKA PANJANG (2019- 2046)

Program Kerja Nasional merupakan rangkaian kegiatan sistematis, terukur, dan berkesinambungan untuk mewujudkan Visi dan Misi organisasi, meliputi seluruh kebutuhan *bangso* Batak melaksanakan nilai-nilai *Dalihan Na Tolu* dan kebangsaan Indonesia yang termaktub dalam Konstitusi 2019 LOKUS ADAT BUDAYA BATAK. Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pendirian LABB sebagai bagian dari cita-cita dan tujuan Negara Republik Indonesia.

Keseluruhan semangat, arah, dan gerak pelaksanaan *Guratgurat Bolon Ni Parao* LABB dilaksanakan sebagai pengamalan seluruh nilai-nilai Dasa Cita *bangso* Batak dan kebangsaan Indonesia yang harmoni dan sebagai kesatuan yang utuh, meliputi :

1. Pengamalan nilai-nilai yang tersirat dan tersurat dalam *Dalihan Na Tolu* : *Manat Mardongan Tubu, Somba Marhula-hula, Elek Marboru.*
2. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang antara lain merupakan Sumpah Nasional seluruh rakyat Indonesia (termasuk *bangso* Batak) tanpa memandang usia, latar belakang (pendidikan, agama, suku), jabatan, kaya-miskin untuk bersumpah :
 - 1). Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, tanah air dan bahasa Indonesia dalam ke-Bhinneka Tunggal Ika-an;
 - 2). Mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi/kelompok;

- 3). Menentang segala upaya pengkhianatan dan makar terhadap Pancasila, Konstitusi UUD 1945 dan pemerintahan yang konstitusional.
3. Pengamalan nilai-nilai yang tersirat dan tersurat dalam : Kejuangan para Pahlawan *bangso* Batak/Nasional, para Pejuang Pergerakan Kebangsaan/Perintis Kemerdekaan, para Pendiri Negara, para Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Kejuangan tersebut antara lain : Mati-matian berupaya dan bekerja keras membangun *bona pasogit*/negeri berdasarkan cinta tanah air; Pantang menyerah membangun karakter diri menuju keluhuran budi seperti diamanatkan dalam UUD NKRI 1945. Nilai-nilai kejuangan itulah syarat utama membangun *bangso* Batak yang Bersatu, Beriman, Cerdas, Sejahtera, Bearadat, Beradab, dan Beridentitas dalam rangka memperteguh kebangsaan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.
4. Pengamalan nilai-nilai yang tersirat dan tersurat dalam : Kekuatan Visi (Cita-Cita) LABB dan nasional sebagaimana termaktub pada alinea ke-2 pembukaan AD LABB 2109 dan alinea ke-2 pembukaan UUD NKRI 1945.
5. Pengamalan nilai-nilai yang tersirat dan tersurat dalam : Semangat mewujudkan Tujuan LABB dan Nasional, yaitu : Tetap tegak dan utuhnya *bangso* Batak dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945, antara lain dengan meningkatkan keyakinan seluruh warga *bangso* Batak, bahwa jika negara Kesatuan Republik Indonesia tidak tetap tegak dan utuh dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, maka Visi (Cita-Cita) LABB dan nasional

tidak akan bisa diwujudkan. *Horas Indonesia, Hiras bangso Batak.*

Tujuan LABB ini harus dipertahankan sepanjang masa, tersurat dalam alinea ke-3 pembukaan AD LABB 2019 selaras dengan tujuan nasional pada alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, dengan “Membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.

6. Pengamalan nilai-nilai yang tersirat dan tersurat dalam : Semangat melaksanakan Tugas Nasional amanat konstitusi UUD 1945, antara lain menjabarkan lima Tugas Konstitusi yang wajib dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh : seluruh warga *bangso Batak* untuk mewujudkan Visi (Cita-Cita) dan Tujuan Nasional pemerintah Negara Republik Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kelima tugas (Panca Embanan) konstitusi itu adalah :
 - 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia;
 - 2) Melindungi seluruh Tumpah darah Indonesia;
 - 3) Memajukan Kesejahteraan umum;
 - 4) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - 5) Ikut sertanya bangsa Indonesia melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
7. Pengamalan nilai-nilai yang tersirat dan tersurat dalam : Semangat yang lahir dari nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila digunakan sebagai cara memandang dan menentukan kebijakan serta cara memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi *bangso Batak*. Pancasila sebagai dasar negara memiliki tiga dimensi, yaitu

Pertama : Sebagai Kebangkitan Nasional kembali. Kedua : Sebagai niat dan tekad kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketiga : Sebagai sumber ketahanan nasional di segala bidang. Selain menjadikan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup warga *bangso* Batak, juga merupakan tujuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harus dicapai yang sasarannya adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil dan makmur, tentram, *sangap, gabe* (Keadilan yang berkemakmuran, dan Makmur yang berkeadilan, melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Kedaulatan *punguan marga/punguan parsadaan* marga, bukan oleh kedaulatan yang lain) dengan kekuatan semangat Dalihan Na Tolu dalam persatuan Indonesia berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Kuasa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kelima ideologi Pancasila harus dijadikan sebagai landasan strategi nasional *bangso* Batak yang merupakan makna dan substansi alinea ke-4 pembukaan UUD NKRI 1945.

8. Pengamalan nilai-nilai yang tersirat dan tersurat dalam : Semangat Wawasan Nusantara sebagai landasan Visional, antara lain mewujudkan Kesatuan dan Persatuan dalam Pluralitas (Daerah, Suku, Agama, Bahasa, Adat, Budaya) agar dapat bertahan dan pengendali dalam dinamika perubahan serta menumbuhkan sikap kepedulian untuk mewujudkan daya perekat dan pengendalian diri yang kuat. Mewujudkan tujuan Wawasan Nusantara, yaitu tumbuh kembangnya “Rasa dan sikap Nasionalisme yang tinggi, Rasa senasib dan sepenanggungan, Rasa se-Bangsa, se-Tanah air dan satu tekad bersama”.
9. Pengamalan nilai-nilai yang tersirat dan tersurat dalam : Semangat dan ajaran ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional bahwa ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segala aspek kehidupan nasional

yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Mengembangkan kekuatan nasional berarti mengembangkan pusat kekuatan strategis bangsa Indonesia.

Pusat kekuatan *bangso* Batak adalah semangat Persatuan dan Kesatuan Ke-Indonesia-an yang berdasarkan nilai-nilai *Dalihan Na Tolu* merupakan resultante dari :

- 1) Kepemimpinan Nasional para pemimpin Lokus Adat Budaya Batak yang memiliki jatidiri *habatakon* dalam Pancasila;
- 2) Kekuatan dan Kemampuan Lokus Adat Budaya Batak;
- 3) Dukungan Ketahanan warga *bangso* Batak.

Kebebasan bertindak yang tidak dapat didikte oleh siapapun baik aktor negara maupun aktor non-negara.

Semangat juang untuk berperang menghadapi segala ancaman Ketahanan *bangso* Batak dan Nasional sebagai landasan konsepsional merupakan konsep pembangunan, pengaturan dan pengamanan di segala aspek kehidupan nasional secara terpadu, selaras, seimbang dan serasi dalam rangka menciptakan kehidupan warga *bangso* Batak yang semakin maju, adil dan makmur.

Ketahanan nasional sebagai suatu strategi mengingat ancaman yang membahayakan *bangso* Batak dan Indonesia ditujukan kepada semua bidang kehidupan masyarakat serta adanya kelemahan-kelemahan yang melekat dalam warga

bangso Batak khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya yang majemuk dan sedang membangun untuk mempertahankan kelangsungan hidup *bangso* Batak dan bangsa Indonesia.

Strategi yang digunakan yaitu dengan cara memantapkan ketahanan warga *bangso* Batak untuk mengembangkan "Kekuatan Nasional di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya. Kekuatan Pertahanan Keamanan dalam rangka terwujudnya Cita-Cita Nasional, Tujuan Nasional dan Kepentingan Nasional".

10. Pengamalan nilai-nilai yang tersirat dan tersurat dalam : Semangat merumuskan Kepentingan Nasional berdasarkan tugas nasional yang dijabarkan menjadi Kepentingan Nasional yang statis (Kepentingan yang tidak berubah sepanjang masa sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, saat ini dan ke depannya) dan Kepentingan Nasional yang dinamis (Kepentingan yang dalam kurun waktu tertentu di masa mendatang). Kedua kepentingan ini merupakan tugas-tugas bagi setiap Dewan Mangaraja LABB, Dewan Penasehat LABB, dan Dewan Pengurus Pusat LABB pada segala tingkatan di dalam menyusun Program Kerja Nasional dalam rangka mengemban amanah seluruh warga *bangso* Batak pada masa baktinya.

Berdasarkan landasan pokok pikiran di atas, maka hakikat Program Kerja Nasional Lokus Adat Budaya Batak adalah pembangunan warga *bangso* Batak di *bona pasogit* dan di perantauan dilaksanakan sistematis, berkesinambungan dan bersinergi (bergotong royong berlandaskan semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan *habatakon*) dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaga negara, Lembaga/institusi non-pemerintah dalam Pembangunan semesta di seluruh nusantara.

Program Kerja Nasional adalah Program Kerja dari, oleh, dan untuk warga *bangso* Batak. Dilaksanakan bersama-sama dalam semua aspek kehidupan warga *bangso* Batak meliputi : Aspek sistem pemerintahan desa adat, peradilan adat, ekonomi, teknologi, ekologi, total media, sosial budaya, dan pertahanan kemananan dengan senantiasa harus merefleksikan nilai-nilai *Dalihan Na Tolu* yang diselenggarakan dengan mengerjakan bidang-bidang pembangunan yang diselaraskan dengan tujuan Lokus Adat Budaya Batak.

Guratgurat Bolon Parao Ni LABB diselenggarakan secara bertahap dalam jangka panjang 28 (dua puluh delapan) tahunan, jangka menengah/średang 4 (empat) tahunan, dan jangka pendek 1 (satu) tahun dengan mendayagunakan seluruh sumber daya warga *bangso* Batak.

B. TUJUAN GURATGURAT BOLON NI PARAO LABB

Guratgurat Bolon Ni Parao LABB bertujuan untuk mewujudkan *bangso* Batak yang Bersatu, Beradat, Beiman, Cerdas, Sejahtera, Beradat, Beradab, dan Beridentitas yang merata berlandaskan pada nilai-nilai *Dalihan NaTolu* dan olehnya : Harkat dan Martabat warga *bangso* Batak terpelihara; Sistem Pemerintahan dan Ketatanegaraan Indonesia dalam dukungan warga *bangso* Batak terlaksana; Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap teguh dan utuh (terpelihara); Ketahanan Sosial Budaya Batak di *bona pasogit* dan di Perantauan terwujud; Seluruh potensi warga *bangso* Batak baik yang tinggal di *bona pasogit* dan yang berada di perantauan terhimpun menjadi kekuatan sumberdaya pembangunan; dan pemberdayaan Ekonomi Kreatif (Pariwisata, industri kreatif, dll) di *bona pasogit* terwujud.

C. ASAS GURATGURAT BOLON NI PARAO LABB

Asas adalah prinsip pokok *Guratgurat Bolon Ni Parao LABB* yang harus dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Kerja Nasional. Asas-Asas tersebut adalah :

1. Asas Takut dan Taat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa : bahwa segala usaha, perencanaan kegiatan pelaksanaan Program Kerja Nasional digerakkan oleh ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dipertanggungjawabkan kelak dikemudian hari.
2. Asas Manfaat : bahwa segala usaha dan kegiatan pelaksanaan Program Kerja Nasional harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga *bangso* Batak, kelestarian lingkungan hidup beserta isinya, kelestarian sosial budaya lokal dan nasional yang dinamis sesuai perkembangan jaman.
3. Asas taat nilai-nilai *Dalihan Na Tolu* : bahwa segala usaha dan kegiatan pelaksanaan Program Kerja Nasional harus dijiwai, digerakkan, dituntun oleh nilai-nilai *Dalihan Na Tolu* untuk tercapainya Cita-cita dan Tujuan Lembaga Adat Budaya Batak.
4. Asas Hukum dan Asas Budaya Malu : bahwa dalam penyelenggaraan Program Kerja Nasional, setiap pelaksana dalam Keorganisasian Lokus Adat Budaya Batak dan setiap warga *bangso* Batak harus taat pada adat dan pranata hukum adat Batak, dan konstitusi Lembaga. Malu berikhtiar dan melakukan apa saja yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai moral dan kepatutan.

5. Asas Tatakelola Keorganisasian yang baik dan benar : bahwa seluruh usaha dan kegiatan pelaksanaan program Kerja Nasional harus dikelola dengan baik dan benar, dapat dipertanggungjawabkan, dan transparan yang mendukung tugas-tugas LABB untuk mencapai Cita-Cita dan Tujuan LABB.

D. MODAL DASAR DAN FAKTOR DOMINAN

1. Modal Dasar

Modal dasar dimungkinkannya pelaksanaan *Guratgurat Bolon Ni Parao* LABB ini adalah keseluruhan kekuatan warga *bangso* Batak, baik yang efektif maupun potensil yang dimiliki dan didayagunakan dalam dukungan penuh penyelenggara Pemerintahan dan penyelenggara Negara, yaitu :

- a. Pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat *bangso* Batak (*punguan marga/punguan parsadaan marga*) beserta hak-hak tradisionalnya (Hutan adat, tanah adat, adat istiadat, dan pranata hukum adat) sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- b. Ketahanan sosial budaya Batak yang masih tetap kokoh dan masih panutan di *bona pasogit* sebagai garda terakhir Pertahanan dan Keamanan nasional dalam hantamangelombang globalisasi terutama dalam era digital yang sedang menuju sistem Total Media.

- c. Jiwa dan semangat gotong royong (*Horja, marsiadapari*), persatuan, dan kesatuan *habatakon*.
- d. Wilayah masyarakat *bangso* Batak yang masih luas dengan kondisi alamnya yang memiliki keunggulan komparatif.
- e. Kekayaan alam yang beraneka ragam yang terdapat di darat, danau, laut, udara dan dirgantara yang dapat didayagunakan secara bertanggungjawab demi kemakmuran warga *bangso* Batak.

2. Faktor Dominan

Faktor dominan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan *Guratgurat Bolon Ni Parao* LABB agar memperlancar pencapaian sasaran *Guratgurat Bolon Ni Parao* LABB meliputi :

- a. Kependudukan dan sosial budaya, termasuk pergeseran nilai (paradigma) dan perkembangan aspirasi warga *bangso* Batak yang dinamis;
- b. Wilayah yang bercirikan gunung-gunung, lembah-lembah, danau, laut dengan lingkungan dan alam tropiknya;
- c. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata penyebarannya termasuk flora dan fauna;
- d. Kualitas sumber daya manusia warga *bangso* Batak dan penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan dan daya saring terhadap pembanjiran informasi;
- e. Sistem pemerintahan desa adat (jika ada) dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia.

- f. Sistem peradilan adat (jika ada) dalam kerangka sistem hukum nasional.
- g. Perkembangan sosial media menuju total media;
- h. Kemungkinan pengembangan.

DMABLABB

BAB IV
GURATGURAT BOLON NI PARAO LABB EMPAT TAHUN
PERTAMA
(2019 -2022)

A. KONDISI UMUM

Kukuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa bagi *bangso* Batak khususnya dan rakyat Indonesia umumnya untuk tetap memiliki dan memelihara semangat persatuan dan kesatuan ke-Indonesia-an serta merupakan dasar Lokus Adat Budaya Batak melaksanakan program Kerja Nasional.

Sekalipun seluruh warga *bangso* Batak bersama seluruh rakyat Indonesia dan penyelenggara negara/penyelenggara pemerintahan serta segenap potensi bangsa telah berusaha menegakkan dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun masih ada ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap persatuan *bangso* Batak sebagai bagian dari keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdampak langsung kepada pencapaian cita-cita Lokus Adat Budaya Batak.

Faktor Eksternal :

Konflik tenurial, konflik kultural, dan konflik horizontal (Hutan,tanah, suku, ras, dan agama) serta menguatnya gejala disintegrasi di berbagai daerah merupakan gangguan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kalau tidak segera ditanggulangi akan dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Di bidang ketatanegaraan terjadi reduksi kewenangan dan posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen UUD 1945

telah menghapus utusan golongan dari keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga ada golongan-golongan yang tidak dilibatkan dalam pembangunan, dalam proses politik, dan dalam proses pengambilan kebijakan nasional yang berpengaruh langsung terhadap status hukum dan kehidupan *bangso* Batak. Kalaupun dilibatkan adalah keterpaksaan melalui jalur yang tidak dikehendaknya dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. MPR RI telah kehilangan penengah dan juru damai apabila terjadi konflik antar fraksi partai politik di Parlemen. Selain daripada itu ketiadaan lembaga tertinggi negara memicu niat antar Lembaga Negara berebut pengaruh dan terperangkap oleh ego sektoral yang justru semakin menjauh dari perwujudan cita-cita dan Tujuan nasional.

Di bidang pembuat peraturan perundang-undangan terdapat kecenderungan hanya mengejar jumlah/target peraturan perundang-undangan yang didorong oleh kepentingan kelompok tertentu, dan tidak jarang mengalami gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, sehingga kepercayaan rakyat semakin tergerus terhadap integritas dan kredibilitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan kualitas produk-produknya.

Di bidang sosial politik, terjadi kecenderungan kooptasi kekuatan-kekuatan politik atas kemandirian anggotanya untuk berpikir dan berperilaku kritis-konstruktif terhadap jalannya pemerintahan yang berpeluang menyimpang. Keputusan-keputusan politik dilandasi prinsip transaksional untuk kompromistis, menginginkan perubahan instan dan inskonstitusional sehingga sangat sulit diharapkan terjadi pengawasan yang objektif. Adopsi bulat-bulat pengertian dan implementasi Hak Asasi Manusia, Demokrasi ala Barat, dan pemahaman picik ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah menggiring sesama anak bangsa, rakyat dengan penyelenggara negara/ penyelenggara pemerintahan ke panggung perang

terbuka : Saling memaki, saling menghina, saling memperkarakan, saling menuntut, saling mempermalukan, dan saling menjatuhkan. Padahal, nilai-nilai Pancasila dan Dalihan Na Tolu menyediakan cara, wadah dan mekanisme beradat dan beradab untuk mendiskusikan serta berdialektika mengatasi berbagai persoalan *bangso* Batak khususnya, persoalan bangsa dan negara pada umumnya tanpa harus mengorbankan Tujuan dan Kepentingan LABB dan Nasional.

Di bidang pemerintahan, terjadi ketidakleluasaan dalam bertindak menjalankan program-program kerja nasional sesuai konstitusi karena tarikan-tarikan kekuatan oligarki partai. Tarikan tersebut semakin menguat tatkala masa pemerintahan yang sedang berkuasa semakin mendekati masa pemilihan umum. Praktis waktu efektif yang dapat dipergunakan pemerintah tidak mencapai seperti yang diharapkan.

Di bidang keamanan, terjadi teror atas nama agama, penculikan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, pemusnahan rumah ibadah yang memberi kesan Penyelenggara Pemerintahan/Penyelenggara Negara tidak hadir di tengah kehidupan rakyatnya. Penyelenggara Pemerintahan/ Penyelenggara Negara gagal melaksanakan salah satu tugas nasionalnya, yaitu melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia.

Di bidang hukum, terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme, aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan. Dominasi hukum nasional yang cenderung mengabaikan hukum adat/lokal telah memicu hasrta untuk melepaskan diri dari Negara Kestuan Republik Indonesia.

Di bidang perekonomian, terjadi penguasaan atas sumber daya efektif dan potensial oleh kelompok-kelompok tertentu sehingga prinsip kebersamaan, prinsip kekeluargaan dalam mengelola perekonomian nasional mati suri dilindas oleh kuatnya hantaman palu godam para pemilik modal besar. Negara seolah berada dalam kontrol kekuatan-kekuatan tertentu dalam mengelola bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Di bidang moneter, terjadi ketaatan pada rejim bebas nilai mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika, membuat mata uang rupiah sangat sensitif terhadap fluktuasi nilai mata uang Amerika, sehingga kepercayaan masyarakat Internasional dan pengusaha terhadap mata uang rupiah belum beranjak ke tingkat yang lebih baik.

Di bidang lingkungan hidup, terjadi eksploitasi berlebih terhadap hutan tropis, hutan adat, tanah adat dan keinginan kuat mengubah spesies tanaman multikultur menjadi monokultur yang diyakini memberikan keuntungan ekonomis sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang hebat. Banjir bandang dimana-mana, kepunahan spesies-spesies tertentu dan pencemaran lingkungan semakin meningkat.

Di bidang pelayanan aparat pemerintah dan negara, terjadi kelambanan dan pengabaian pemenuhan atas hak-hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan amanat undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Bagi rakyat Undang-Undang tersebut tidak lebih dari sekedar pemanis yang hanya sedap dibaca tapi nir-manfaat.

Di bidang Internasional, terjadi globalisasi di segala bidang, mulai dari perdagangan bebas, ekonomi, keuangan, industri, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan pesat sehingga tidak mungkin suatu negara tidak tergantung dari negara lainnya. Intervensi negara lain dalam berbagai bentuk terhadap kepentingan nasional sangat terbuka luas, dan ini sangat berbahaya apabila kedaulatan bangsa dan negara Indonesia di bawah kendali negara lain atau kekuatan lain di luar Indonesia.

Faktor Internal :

Konflik internal (*punguan marga/punguan parsadaan marga*, perebutan harta warisan orang tua, individualisasi kepemilikan/hak penguasaan atas tanah adat), lemahnya implementasi nilai-nilai *Dalihan Na Tolu*, selalu mengedepankan ambisi pribadi dalam berorganisasi dan pengaruh pola hidup *new age movement* merupakan gangguan laten dan subtil bagi terwujudnya *bangso Batak yang Bersatu, Beradat, Beradab, Beriman, Cerdas, Sejahtera, dan Beridentitas*. Jika hal ini tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin akan mengancam kelanggengan persatuan dan identitas *bangso Batak* di kemudian hari.

Sistem ketataorganisasian yang diterapkan dalam *punguan marga/punguan parsadaan marga* tidak mengadopsi nilai-nilai adat *Dalihan na Tolu*. Ia menganut ketataorganisasian Lembaga Sosial Masyarakat atau Organisasi Masyarakat pada umumnya yang bersifat liberal dan individualistis.

Di bidang pemerintahan, terdapat kecenderungan ketidakadilan perlakuan secara fair menurut ukuran-ukuran yang berlaku secara umum dan objektif untuk meraih berbagai strata kepemimpinan strategis. Masih dirasakan adanya pengaruh *invisible power* yang menghambat karir seseorang hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

Di bidang pembuatan peraturan-peraturan dan penyusunan program kerja daerah masih belum melibatkan secara optimal peranan dari tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan belum menyentuh pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akar rumput.

Di bidang perekonomian, terjadi penguasaan individual atas berbagai sumber-sumber alam dan peluang yang ada. Akses masyarakat terhadap sumber informasi dan perekonomian dihambat dengan berbagai cara yang kelihatannya seolah-olah legal.

Di bidang sosial politik, masih dirasakan adanya politik adu domba di internal/eksternal marga-marga dan masyarakat demi kepentingan pribadi dan kelompok. Pengaburan sejarah dan identitas menjadi momok yang mengganggu keharmonisan dan menimbulkan saling tidakpercayaan/curiga di antara sesama anak marga.

Di bidang sosial budaya, masih ditemukan pelaksanaan berbagai tata cara adat istiadat yang mengedepankan keberadaan kebendaan seseorang. Belum dilaksanakan secara efektif dan efisien membuat generasi muda mulai menjauhi adat istiadat Batak. Benda-benda kesejarahan *bangso* Batak masih banyak dalam penguasaan bangsa-bangsa lain. Pemeliharaan atas cagar budaya dan situs-situs bersejarah masih jauh dari yang diharapkan.

Di bidang hukum (adat). Penyelesaian perkara-perkara perdata dan Tipiring (Tindak Pidana Ringan) masih mengandalkan peradilan umum. Penyelesaian perkara melalui peradilan umum memakan waktu yang lama dan berbiaya mahal. Pihak yang dimenangkan Pengadilan berpuas diri sementara amarah dan dendam membara memenuhi hati pihak yang kalahkan. Peradilan umum adalah *zero sum game* bagi *bangso Batak*.

Di bidang pengembangan pariwisata, Upaya-upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pariwisata belum melibatkan masyarakat dalam menyusun tata ruang pariwisata. Penentuan lokasi pariwisata secara sepihak telah menimbulkan penolakan masyarakat lokal.

Di bidang industri pedesaan, hasil-hasil produk pertanian/perkebunan, perikanan, dan peternakan masyarakat belum memiliki nilai tambah. Lokasi pengolahan masih berada jauh di luar daerah. Demikian juga sistem pemasaran masih dikuasai kelompok-kelompok tertentu. Belum ada mekanisme yang mampu menghentikan pengaruh turunnya harga-harga komoditas pertanian/perkebunan, perikanan, dan peternakan terhadap pendapatan warga *bangso Batak*.

Di bidang sistem pemerintahan desa, bahwa perangkat desa belum berdaulat dan mandiri melaksanakan amanat UU tentang desa. Intervensi berlebihan kepala daerah membuat perangkat pemerintahan desa mati kreasi dan inovasi. Pada gilirannya akan merugikan masyarakat desa.

Sejarah membuktikan tekad penyelenggara Pemerintahan dan penyelenggara Negara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional untuk memberantas segala bentuk penyelewengan sesuai tuntutan nilai-nilai Pancasila seperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta kejahatan ekonomi keuangan dan penyalahgunaan kekuasaan, pemberantasan terorisme, radikalisme dan narkobaisme, cenderung berujung pada kebuntuan.

Kondisi-kondisi tersebut di atas akan menghasut kelompok-kelompok tertentu tergoda mencari jalan pintas yang inskonstitusional untuk melakukan perubahan cepat dalam segala bidang yang pada akhirnya merusak keamanan nasional dan menggagalkan terwujudnya Cita-cita dan Tujuan Pendirian LABB sebagai bagian dari Cita-cita dan Tujuan Negara Republik Indonesia.

B. TUJUAN GURATGURAT BOLON NI PARAO LABB EMPAT TAHUN PERTAMA

Tujuan *Guratgurat Bolon Ni Parao* LABB Empat Tahun Pertama adalah :

1. Tersosialisasikannya nilai-nilai *Dalihan Na Tolu* kepada seluruh warga *bangso* Batak dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Tersosialisasikan dan diimplementasikan *ruhut-ruhut paradaton* adat Batak yang esensial, efektif, dan efisien yang dimulai dari Jabodetabek hingga ke seluruh Indonesia.

3. Terbentuknya desa adat/nagari yang didiami warga *bangso* Batak di *bona pasogit*.
4. Terbentuknya lembaga penyelesaian konflik Tenurial/agraria dan konflik kultural (Peradilan Adata Batak) yang mandiri dan berotoritas.
5. Adanya *road map* pengembangan SDM warga *bangso* Batak, pariwisata dan kebudayaan *bangso* Batak untuk menggarangi peradaban nasional.
6. Tersedianya sarana dan prasarana bagi pengembangan sumberdaya efektif dan potensil di wilayah-wilayah seluruh warga *bangso* Batak sebagai landasan utama untuk pelaksanaan Program Kerja Empat Tahun berikutnya (2022-2025);
7. Tersedianya media komunikasi dan media publikasi LABB.

C. PRIORITAS GURATGURAT BOLON NI PARAO LABB EMPAT TAHUN PERTAMA

Dengan ditetapkannya bidang *habatakon* (Adat Istiadat dan peradilan adat Batak) dan jatidiri *bangso* Batak sebagai titik berat perjuangan yang merupakan penggerak utama program kerja Jangka Menengah Empat Tahun Pertama dan seiring dengan perkembangan kualitas sumber daya manusia *bangso* Batak serta teknologi informasi, maka prioritas Program Kerja Menengah Empat Tahun Pertama adalah konsolidasi internal ketataorganisasian Lokus Adat Budaya Batak dengan melengkapi kepengurusan di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan di tingkat Desa

dibungkus dengan sosialisasi dan implementasi nilai-nilai *Dalihan Na Tolu*, pelaksanaan adat istiadat Batak yang efektif dan efisien, pengayaan Pranata Hukum Adat Batak yang dikembangkan sebagai berikut:

1. Melengkapi sarana dan prasarana tempat kerja Dewan Mangaraja LABB, Dewan Penasihat LABB, dan Dewan Pengurus Pusat LABB;
2. Mengadakan sarana dan prasarana sistem komunikasi dan publikasi baik media cetak, media elektronik, dan sosial media serta merekrut sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk publikasi;
3. Membina dan menata hubungan antar lembaga;
4. Membentuk Dewan Pengurus LABB tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa (khusus di *bona pasogit*) di seluruh Indonesia.
5. Mengadakan modul-modul sosialisasi nilai-nilai *Dalihan Na Tolu*, pelaksanaan adat istiadat Batak yang efektif dan efisien, Pranata Hukum Adat Batak yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan, usia, budaya warga warga *bangso* Batak sebagai bahan utama terstandarisasi;
6. Memberdayakan sumber daya alam efektif dan potensil 12 % di pedesaan wilayah-wilayah warga *bangso* Batak;
7. Mencermati perkembangan bidang politik, hukum, ketatanegaraan, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kebijakan-kebijakan penyelenggara Pemerintahan dan penyelenggara Negara menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta

kecenderungan digitalisasi manusia dan sistem yang meliputinya untuk dijadikan bahan kajian dan bahan masukan bagi pihak-pihak pemangku kepentingan dengan senantiasa berazaskan pada Pancasila, berlandaskan pada UUD 1945 dan nilai-nilai Dalihan Na Tolu;

8. Memperkenalkan Pariwisata dan adat-budaya *bangso* Batak, kepada masyarakat luas baik dalam negeri maupun luar negeri;
9. Memperluas jejaring dan kerjasama dengan lembaga-lembaga adat suku lainnya.

BAB V

PELAKSANAAN

A. PELAKSANAAN *GURATGURAT BOLON NI PARAO* LABB

Guratgurat Bolon Ni Parao LABB yang ditetapkan oleh Dewan Mangaraja Lokus Adat Budaya Batak dilaksanakan oleh seluruh Kepengurusan Lokus Adat Budaya Batak di segala tingkatan kepengurusan, mulai dari tingkat pusat/nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa. Strategi melaksanakan Program Kerja disesuaikan dengan sifat unik dan karakteristik adat budaya masing-masing *bangso* Batak. Dewan Mangaraja LABB berkewajiban membimbing dan mengawasi pelaksanaan program kerja oleh Dewan Penasehat LABB dan Dewan Pengurus Pusat LABB.

B. PELAKSANAAN *GURATGURAT BOLON NI PARAO* LABB EMPAT TAHUN PERTAMA

Guratgurat Bolon Ni Parao LABB Jangka Menengah 4 (empat) tahunan disusun berdasarkan *Guratgurat Bolon Ni Parao* LABB Jangka Panjang (28 tahun) dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat LABB dan Dewan Penasehat LABB sesuai dengan ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenangnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan saran dari Pimpinan Dewan Mangaraja LABB.

Dalam *Guratgurat Bolon Ni Parao* LABB Jangka Menengah 4 (empat) Tahun Pertama yang meliputi kurun waktu 2019-2022

pelaksanaannya tetap bertumpu pada nilai-nilai Dalihan Na Tolu. Nilai-nilai Dasacita Nasional *bangso* Batak tersebut saling mengait dan merupakan satu kesatuan yang terpadu dan menyeluruh.

Guratgurat Bolon Ni Parao LABB untuk setiap tahun dituangkan dalam rencana operasional dalam bentuk kegiatan dan anggaran belanja dilengkapi pencapaian kuantitatif dan *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing bidang yang hendak dicapai.

Berhasilnya pelaksanaan *Guratgurat Bolon Ni Parao* LABB ini tergantung pada membara tidaknya semangat kejuangan yang dimiliki oleh ketua umum pungen parsadaan marga-marga/marga, aktivis sosial budaya Batak, seluruh jajaran anggota dan pimpinan Dewan Mangaraja LABB, Dewan Pengurus LABB, dan Dewan Penasehat LABB pada seluruh tataran tingkatan sebagaimana semangat kejuangan yang dimiliki oleh para Pejuang *bangso* Batak/Nasional, para Pejuang Pergerakan Kebangsaan/Perintis Kemerdekaan, dan para Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

BAB VI

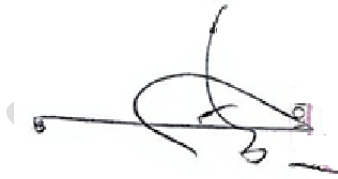
PENUTUP

Guratgurat Bolon Ni Parao LABB empat Tahun Pertama merupakan awal dari *Guratgurat Bolon Ni Parao* LABB Dua Puluh Delapan Tahun Pertama yang akan menghantarkan warga *bangso* Batak menjadi suatu *bangso* yang Bersatu, Beradat, Beradab, Beriman, Cerdas, Sejahtera, dan Beridentitas untuk menjadi soko guru perekonomian dan benteng terakhir pertahanan keamanan nasional, persatuan dan kesatuan ke-Indonesia-an demi tetap tegak dan utuhnya Negara Republik Indonesia.

-----*****-----

Jakarta, Januari 2019.

Ketua Umum DM-LABB,



Brigjen TNI (Purn) Berlin Hutajulu.

Sekretaris Jenderal,



Marsma TNI (Purn) Darlis Pangaribuan.M.Sc.